

Judul : Forum G-20 jangan sebatas seremoni
Tanggal : Rabu, 02 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

RABU, 2 FEBRUARI 2022

KETENAGAKERJAAN

Forum G-20 Jangan Sebatas Seremoni

JAKARTA, KOMPAS — Di balik kepercayaan dunia kepada Indonesia selaku tuan rumah G-20 tahun ini, ada tumpukan pekerjaan rumah di dalam negeri terkait kesejahteraan dan perlindungan pekerja yang perlu dihadapi. Selain membahas problem global, forum Labour 20 atau L-20 juga diharapkan mampu mendorong perbaikan regulasi dan kebijakan guna mengatasi benang kusut sektor ketenagakerjaan domestik yang sudah menahun.

Pertemuan perdana forum L-20 diadakan di Jakarta, Senin (31/1/2022), dengan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu memperluas perlindungan ketenagakerjaan kepada pekerja platform digital, menciptakan pekerjaan layak dan cakupan jaminan sosial universal, serta mendorong perubahan iklim dan transisi yang adil bagi pekerja. Ketiga isu itu sejalan dengan tema besar yang diangkat Indonesia selaku presidensi G-20 2022.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Selasa (1/2), mengatakan, kesempatan presidensi G-20 tahun ini jangan sampai berakhir menjadi seremoni tanpa makna yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Forum L-20 dan presidensi G-20 harus mampu menghasilkan pembenahan regulasi dan kebijakan konkret di bidang ketenagakerjaan. Apalagi, di tengah rumitnya problem ketenagakerjaan di dalam negeri akibat dampak disrupsi ganda pandemi Covid-19 dan digitalisasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kita sering terjebak dengan seremoni tanpa tindak lanjut yang bermakna. Padahal, kita masih punya banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Presidensi G-20 ini seharusnya bisa jadi kesempatan untuk mendorong perbaikan nyata dari hulu ke hilir di sektor ketenagakerjaan," ujar Timboel saat dihubungi di Jakarta.

Menurut Timboel, perbaikan setelah G-20 idealnya dilaku-

kan komprehensif. Adapun cakupannya meliputi pembenahan sistem pelatihan dan volasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, perbaikan perlindungan dan jaminan sosial sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja, serta peningkatan pengawasan ketenagakerjaan guna mendorong iklim hubungan industrial yang lebih kondusif.

"Ini masalah klasik yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Sudah banyak forum-forum pertemuan internasional untuk membahas isu-isu ini, tetapi belum ada dampak signifikan," katanya.

Badan Pusat Statistik mencatat, per Februari 2021 terdapat 21,52 juta orang atau 10,32 persen dari total penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak Covid-19. Angka pengangguran mencapai 9,1 juta orang atau 6,49 persen. Kendati menurun dibandingkan dengan Agustus 2020, jumlah itu masih di atas level prapandemi.

Angkatan kerja yang terserap di sektor informal yang minim kepastian dan perlindungan kerja juga tercatat lebih banyak ketimbang sektor formal. Sesuai data BPS, provinsi dengan angka pengangguran rendah justru mencatat persentase penduduk miskin tertinggi di tingkat nasional.

Selain dampak pandemi, sistem pengupahan baru yang berlaku setelah UU Cipta Kerja juga berpengaruh pada kesejahteraan pekerja. Tahun ini, rata-rata kenaikan upah minimum hanya 1,09 persen, tercatat di bawah angka inflasi tahunan per Desember 2021 yang sebesar 1,87 persen.

Dihubungi terpisah, Direktur Indonesia Labor Institute Rekson Silaban selaku Co-chair Forum L-20 mengatakan, tiga isu besar terkait pekerja digital, jaminan sosial universal, dan transisi perubahan iklim dipilih karena menjadi isu yang kini sedang dihadapi banyak negara anggota G-20, termasuk Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan lebih kuat menjalankan

[Bersambung ke hlm 15 kol 6-7]

Umum | 15

Forum G-20

(Sambungan dari halaman 1)

perannya sebagai tuan rumah jika bisa membereskan berbagai pekerjaan rumah yang selama puluhan tahun ini terus mengganggu hubungan industrial.

Ia menambahkan, forum L-20 akan melakukan berbagai diskusi dengan serikat buruh dari sejumlah anggota G-20 dan komunitas pengusaha yang tergabung di B-20 untuk mendorong rekomendasi di KTT G-20 pada November 2022.

Saat membuka acara Kick-Off Meeting L-20 di Jakarta, Senin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, presidensi G-20 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan menuju era digital. (AGE)